



2

0

2

3

# LAPORAN KINERJA

[www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id)



**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,**

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penyusunan LAKIN setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan.

KPKNL Bontang sebagai instansi yang berada di naungan Kementerian Keuangan telah Menyusun LAKIN Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam setahun. Dalam pengelolaan pencapaian kinerja, KPKNL Bontang menggunakan sistem Balance Score Card (BSC) sebagai tools perhitungan performanya. Balance Score Card (BSC) melakukan pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu Three, antara Kepala KPKNL Bontang dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Sejak Tahun 2022, KPKNL Bontang mendapat tantangan baru dengan masuknya wilayah Kabupaten Berau menjadi wilayah kerja KPKNL Bontang. Penambahan wilayah kerja tersebut merupakan peluang dan tantangan bagi KPKNL Bontang untuk terus meningkatkan integritas dan sinergi dengan berbagai pihak serta meningkatkan kualitas layanan kepada para pengguna jasa dan mitra kerja KPKNL Bontang.

Laporan kinerja ini disajikan untuk memberikan gambaran secara detail dan transparan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan di KPKNL Bontang dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan KPKNL Bontang.

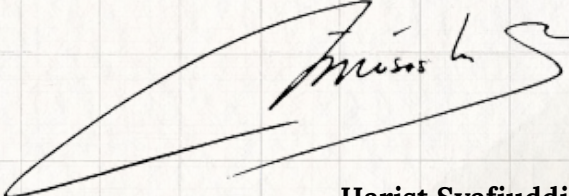
Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Bontang yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Atas seluruh usaha yang telah dilakukan setiap jajaran KPKNL Bontang dalam mewujudkan kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar- besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

**Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023, diperoleh :**

**NKO 114,83%**

**Perolehan diperoleh dari masing-masing perspektif yaitu stakeholder perspective (33,64%), customer perspective (22,43%), internal process perspective (29,70%) serta learning and growth perspective (29,85%).**

**Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang**



**Harist Syafiuddin**



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Di Tahun 2023, KPKNL Bontang telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bontang Tahun 2023. Adapun perjanjian kinerja tersebut, telah diadendum sebanyak 1 kali pada tanggal 27 September 2023.

Dua sasaran strategis yang mengalami perubahan nama, sebagai berikut :

Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan **menjadi** Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan

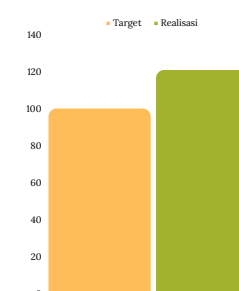
Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif **menjadi** Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis, terdapat 1 (satu) IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal yang berwarna kuning. Realisasi IKU tersebut sebesar 97,99% dari target sebesar 100%. Beberapa sebab IKU tersebut tidak tercapai, diantaranya adalah :

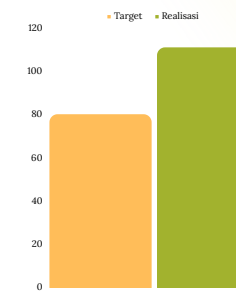
- Formula dari IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan kombinasi perhitungan dari IKPA dan SMART DJA yang mengalami perubahan di akhir tahun
- Target efisiensi minimal 10% untuk mendapatkan nilai optimal dari SMART DJA dirasa cukup berat. Dikarenakan akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder.

Selanjutnya, terdapat **6 (enam) IKU dengan performa amat luar biasa**. Keenam IKU ini merupakan turunan dari 5 Sasaran Strategis. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

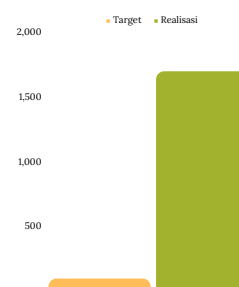
**IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang** berhasil direalisasikan sebesar 120,79% dari target sebesar 100%.



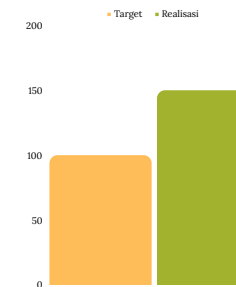
**IKU Persentase Produktivitas Lelang** berhasil melampaui target hingga 30,92%. IKU ini ditargetkan sebesar 80% dan berhasil ter-realisasi sebesar 110,92%.



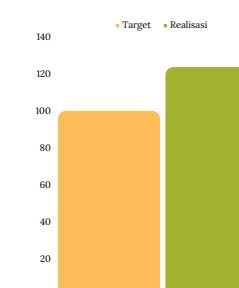
**IKU Penurunan Outstanding Piutang Negara**. IKU ini merupakan IKU dengan capaian yang sangat jauh melampaui target, sebesar 1697,45%.



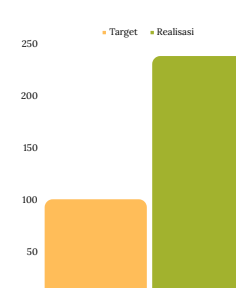
**IKU Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)** direalisasikan sebesar 150% dari target sebesar 100%.



**IKU Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)** berhasil melampaui target hingga 23,65%. IKU berhasil direalisasikan sebesar 123,65% dari target sebesar 100%.



**IKU Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan** dengan capaian sebesar 238% dari target 100%.



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Kemudian, **12 (dua belas) IKU lain** yang juga bewarna hijau dan **melampaui target**, adalah sebagai berikut :

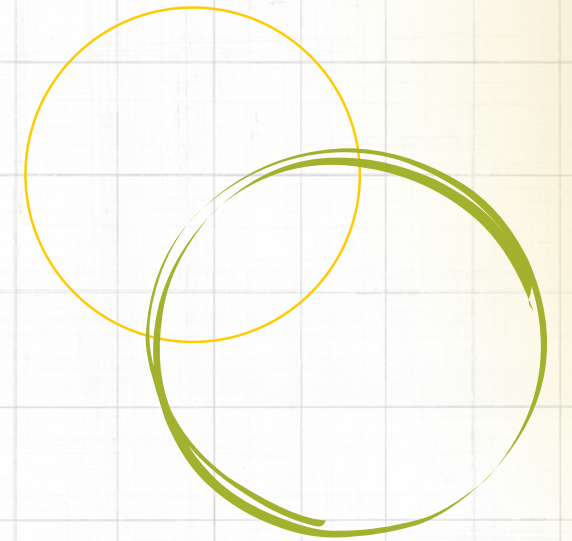
- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p><b>1</b> IKU <b>Indeks Integritas</b> berhasil direalisasikan di angka 89,17.</p>   | <p><b>4</b> IKU <b>Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian</b> berhasil ter-realisasi sebesar 0% dari target 25%, IKU dengan polarisasi minimize.</p>  | <p><b>7</b> IKU <b>Persentase Pelaksanaan Pemohon Lelang Online</b> tercapai sebesar 98,40%.</p>  | <p><b>10</b> IKU <b>Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif</b> tercapai pada angka 98,41.</p>  |
| <p><b>2</b> IKU <b>Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien</b> berhasil direalisasikan di angka 85,11.</p>   | <p><b>5</b> IKU <b>Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN</b> tercapai sebesar 102,32%</p>   | <p><b>8</b> IKU <b>Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara</b> tercapai sebesar 100% dari target 86%</p>  | <p><b>11</b> IKU <b>Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko</b> tercapai pada angka 95,33.</p>   |
| <p><b>3</b> IKU <b>Persentase Realisasi Pokok Lelang</b> berhasil ter-realisasikan di Triwulan IV dengan capaian sebesar 104,32%. KPKNL Bontang merupakan satu-satunya kantor di wilayah DJKN Kalimantan Timur, yang berhasil mencapai IKU tersebut.</p> | <p><b>6</b> IKU <b>Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-conventional Auction</b> dari SS Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif tercapai sebesar 100% dari target 94%.</p> | <p><b>9</b> IKU <b>Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN</b> dari SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal ter-realisasi sebesar 0% dari target 15%, IKU dengan polarisasi minimize.</p> | <p><b>12</b> IKU <b>Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai</b> dari SS Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi ter-realisasi sebesar 120% dari target 100%.</p> |

Adapun, terdapat 1 (satu) IKU dari SS Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif yaitu, Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (PPID) yang tidak memiliki nilai. Hal ini dikarenakan, tidak adanya permintaan permohonan informasi publik selama Tahun 2023.

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bontang Tahun 2023 sebesar 114,83%. Hal ini dapat terwujud atas kinerja, sinergi dan kerja sama yang baik seluruh insan KPKNL Bontang.

Kedepannya, KPKNL Bontang akan terus meningkatkan kualitasnya sesuai dengan motto, “KPKNL Bontang Melayani Lebih Baik”.

Motto tersebut memiliki makna bahwa semua insan KPKNL Bontang berkomitmen untuk tidak langsung berpuas diri. Namun akan senantiasa memperbaiki kualitas layanan kepada para pengguna jasa layanan.



<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>		
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>iii</b>	<b>Bab III Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>7</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>v</b>	<b>A. Capaian Kinerja Organisasi</b>	<b>7</b>
		1. Capaian Kinerja Organisasi	7
		2. Target Kinerja sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020 s.d. 2024	9
<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>1</b>	3. Historis Capaian Kinerja KPKNL Bontang (2019-2023)	13
<b>A. Gambaran Organisasi</b>	<b>1</b>	4. Analisis, Evaluasi dan Rencana Aksi Kinerja	14
<b>B. Aspek Strategis Organisasi</b>	<b>3</b>	5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
<b>Bab II Perencanaan Kinerja</b>	<b>6</b>	<b>B. Realisasi Anggaran</b>	<b>22</b>
		<b>Bab IV Penutup</b>	<b>24</b>

## A. Gambaran Umum Organisasi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 135/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Bontang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sejak Tahun 2022, terdapat penambahan wilayah kerja pada KPKNL Bontang, tepatnya Kabupaten Berau. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sehingga, wilayah kerja KPKNL Bontang meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

**KPKNL Bontang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.**

Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, terdapat subbagian maupun seksi yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, struktur organisasi pada KPKNL Bontang terdiri dari:

### Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL

### Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.

### Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

### Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

### Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### Jabatan Fungsional Penilai

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Jabatan Fungsional Pelelang

Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela

## STRUKTUR ORGANISASI



Sampai dengan akhir Tahun 2023, KPKNL Bontang memiliki 24 (dua puluh empat) pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya, dengan komposisi berdasarkan tingkat golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut :

*Komposisi pegawai berdasar golongan dan jabatan per 31 Des 2023*

No.	Pegawai	II				III				IV				Jumlah
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1.	Eselon III										1			1
2.	Eselon IV							3	1	1				5
3.	Jabatan Fungsional						4	2						6
4.	Pelaksana		1	3	1	2	5							12
Jumlah		-	1	3	1	2	9	5	1	1	1	-	-	24

*Komposisi pegawai berdasar pendidikan per 31 Des 2023*

No.	Pegawai	Pendidikan					Jumlah
		SLTA	D-I	D-III	D-IV/S1	S2	
1.	Eselon III					1	1
2.	Eselon IV				1	4	5
3.	Jabatan Fungsional				6		6
4.	Pelaksana		3	4	5		12
Jumlah		0	3	4	12	5	24

## B. Aspek Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki 4 tujuan mulia yang ingin dicapai, sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, KPKNL Bontang sebagai instansi vertikal di bawah naungan DJKN menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis sebagai berikut :

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdapat beberapa hal yang menjadi isu dan concern KPKNL Bontang selama Tahun 2023.

**Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial**

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

**Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya**

4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

**Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien**

6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif
7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif
8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal
9. Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif
10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi

**Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien**

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional



Permasalahan Strategis KPKNL Bontang Tahun 2023

No.	Tujuan Organisasi	Sasaran Strategis KPKNL Bontang	Strategis Issues
1		Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	<p>Pengurusan Piutang Negara Target Biad tidak tercapai di Tahun 2023, disebabkan karena beberapa hal diantaranya; penanggung hutang memiliki kemampuan dan kemauan yang rendah dalam menyelesaikan utangnya, CKPU membuat pembayaran biad Piutang Negara menjadi lebih kecil, serta penyelesaian BKPN dengan biad sebesar 1% (penyerahan baru)</p> <p>Pelayanan Lelang Banyaknya lelang TAP untuk jenis lelang eksekusi, berdampak bagi realisasi PNBP lelang pejabat lelang kelas I dan Realisasi PNBP lelang sangat bergantung dari pegadaian. PNBP Lelang Pegadaian menyumbang 79% dari total keseluruhan capaian</p> <p>Pengelolaan BMN Capaian pengelolaan BMN banyak disumbang dari capaian pada BLU</p>
2	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	<p>Pelayanan Lelang Realisasi pokok lelang sangat bergantung dari pegadaian. Pokok Lelang Pegadaian menyumbang 88% dari total keseluruhan capaian. Disamping itu, banyaknya lelang TAP untuk jenis lelang pasal 6 UUHT serta lelang kurator, berdampak bagi realisasi pokok lelang pejabat lelang kelas I</p> <p>Pengurusan Piutang Negara Realisasi penurunan oustanding piutang negara pada tahun 2023 jauh melebihi target karena adanya pengembalian 6 BKPN dengan total nilai oustanding sebesar Rp933.608.666,86.</p>
3		Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	<p>Pengelolaan BMN Pagu perjadiin SBSK untuk Kabupaten Berau masih berada di KPKNL Tarakan</p> <p>Pengurusan Piutang Negara Realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) melebihi target yang ditetapkan. Telah diselesaikan sebanyak 15 BKPN dari 10 BKPN. Namun kedepannya, BKPN yang tersisa di lingkup KPKNL Bontang merupakan BKPN dengan kualitas tidak baik. Sehingga, akan diperlukan <i>effort</i> dan sinergi lebih dalam penyelesaiannya.</p>

### Permasalahan Strategis KPKNL Bontang Tahun 2023

4	Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	<p>Pelayanan Lelang</p> <p>Tidak semua Pemohon lelang memahami dan menguasai teknis cara pengajuan lelang online. Sehingga, beberapa permohonan diajukan secara manual dan proses permohonan yang cenderung lama</p> <p>Pengelolaan BMN</p> <p>Terdapat beberapa BMN berupa Rumah Negara yang rusak dan tidak dihuni oleh satker. Sehingga, menurunkan persentase kesesuaian SBSK. Isu serupa lainnya berupa aplikasi SIPETIK milik BPN terkait sertipikat elektronik yang dirasa belum siap digunakan.</p>
5	Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Isu di bidang pelayanan penilaian meliputi, diantaranya; terbatasnya jumlah SDM Jafung Penilai, baik dari segi kuantitas dan kewenangan serta diperlukan biaya yang besar dalam hal survei lapangan dilakukan di wilayah Kabupaten Berau
6		Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	-
7	Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif dan efisien	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Tidak adanya permohonan permintaan penyediaan informasi publik pada KPKNL Bontang selama Tahun 2023, membuat SS ini tidak dapat diukur.
8		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	Target efisiensi minimal 10% untuk mendapatkan nilai optimal dari SMART DJA dirasa cukup berat. Dikarenakan akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder.
9		Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	Pengukuran yang bervariasi terkait rumusan IKU sehingga perlu dilakukan mitigasi sebelumnya.
10		Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Kertas Kerja perhitungan Indeks Pengelolaan Kinerja Pegawai tingkat KPKNL belum disampaikan oleh Kantor Pusat maupun Kanwil, sehingga KPKNL tidak dapat menyusun rencana aksi dari awal tahun.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

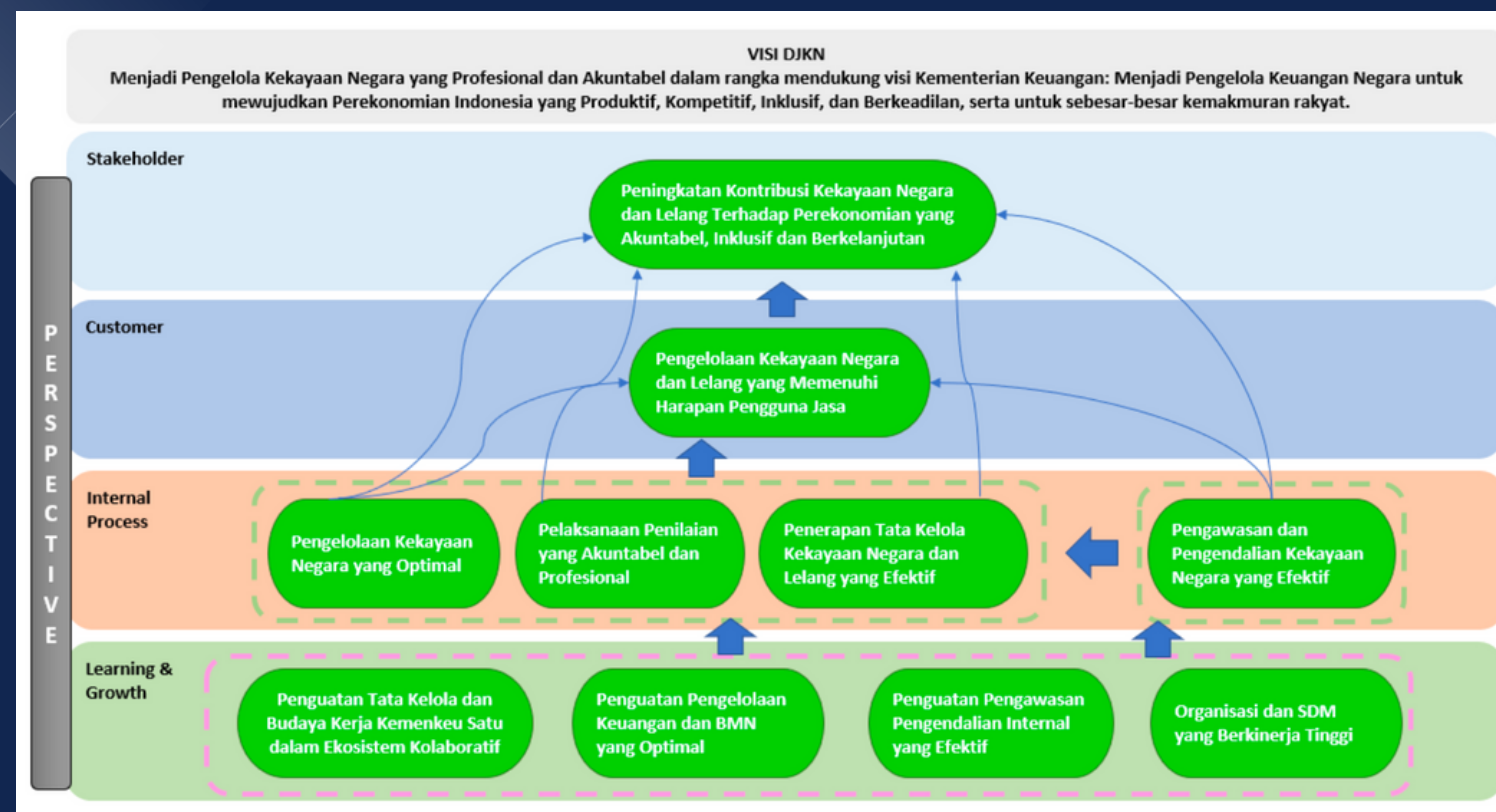
Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan/perjanjian kinerja di lingkup KPKNL Bontang Perjanjian Kinerja nomor PK-04/WKN.13/2023 tanggal 31 Januari 2023 telah mengalami addendum sebanyak 1 (satu) kali. Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi;

- Perubahan Nama Sasaran Strategis
- Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis
- Perubahan Nama IKU
- Penambahan IKU
- Penghapusan IKU
- Perubahan Trajectory Target IKU

Peta strategis KPKNL Bontang mempunyai 4 perspektif, yaitu : stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective serta learning and growth perspective.



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Bontang Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<b>1</b>	<b>Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan</b>	
1a-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%
1c-CP	Indeks Integritas	88.67
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>	
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
<b>3</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>	
3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
<b>4</b>	<b>Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional</b>	
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
4b-CP	Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif</b>	
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-Conventional Auction	94%
5b-CP	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%
5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<b>6</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif</b>	
6a-CP	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
<b>7</b>	<b>Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif</b>	
7a-N	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (PPID)	-
<b>8</b>	<b>Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal</b>	
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
<b>9</b>	<b>Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif</b>	
9b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60%
<b>10</b>	<b>Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi</b>	
10a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80%
10b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

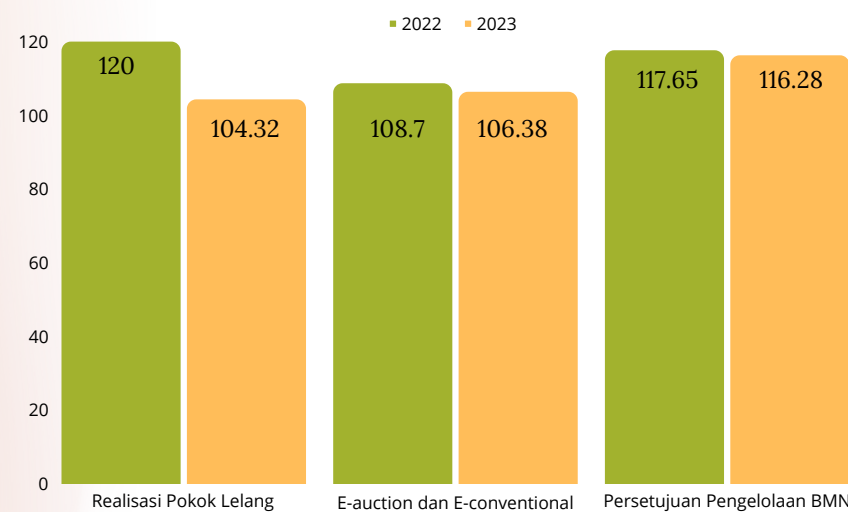
# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja Organisasi

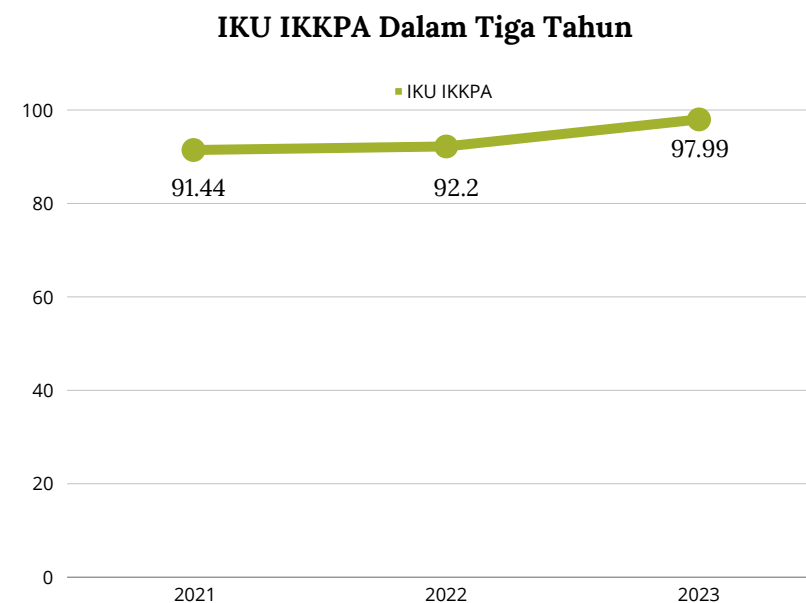
### 1. Capaian Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2023

Pencapaian IKU Tahun 2023 pada umumnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,83%. Perolehan ini lebih kecil sebesar 1,33% dibanding Tahun 2022. Hal ini dikarenakan realisasi dari beberapa IKU strategis tidak sebesar tahun lalu. Beberapa diantaranya seperti IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang, IKU Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-Conventional Auction dan IKU Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milk Negara.

Disamping itu, terdapat IKU Indeks Integritas, dimana nilai yang didapat merupakan skala nasional, sehingga tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Perolehan indeks maksimal dari IKU ini sebesar 100,56% dari 120%.

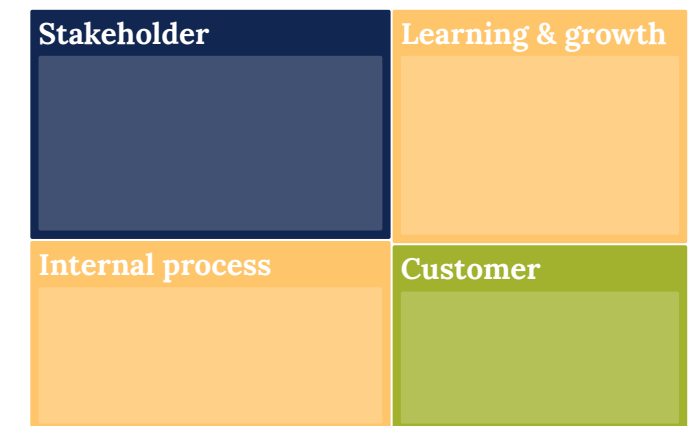


Adapun 1 IKU yang berstatus kuning adalah IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang ter-realisis sebesar 97,99% dari target 100%. Namun demikian, capaian tersebut merupakan capaian terbesar atas IKU tersebut dalam tiga tahun terakhir.



Perhitungan NKO Tahun 2023 menggunakan bobot sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun bobot perhitungan peta strategi dengan 4 perspektif sebagai berikut :

- Stakeholder perspective (30%)
- Customer perspective (20%)
- Internal process perspective (25%)
- Learning & growth perspective (25%)



Formulir Pengukuran Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2023

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Maks (%)
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	120.79%	120%
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	110.92%	120%
		Indeks Integritas	88.67	89.17	100.56%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	104.32%	104.32%
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	1697.45%	120%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%	102.32%	120%
		Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	150%	120%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0%	120%
		Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70%	85.11	120%
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-Conventional Auction	94%	100%	106.38%
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	98.40%	114.42%
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	123.65%	120%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100%	116.28%
7	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (PPID)	-	-	-
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	97.99%	97.99%

	optimal	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	238%	120%
		Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0%	120%
9	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60%	98.41	120%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80%	95.33	120%
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120%	120%
<b>Jumlah Anggaran Program Tahun 2023</b>			<b>IDR 1,644,964,000</b>		
<b>Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2023</b>			<b>IDR 1,620,148,000</b>		

## 2. Target Kinerja sesuai dengan Renstra DJKN Tahun 2020 s.d. 2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan tercapainya kebijakan pada level nasional dan level Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan 4 (empat) Tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Untuk mengukur tingkat pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Terdapat dua indikator yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Indikator tersebut adalah: (1) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK, dan (2) Indeks efektivitas investasi pemerintah. Adapun indikator dan target kinerja milik KPKNL Bontang yang beririsan dengan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

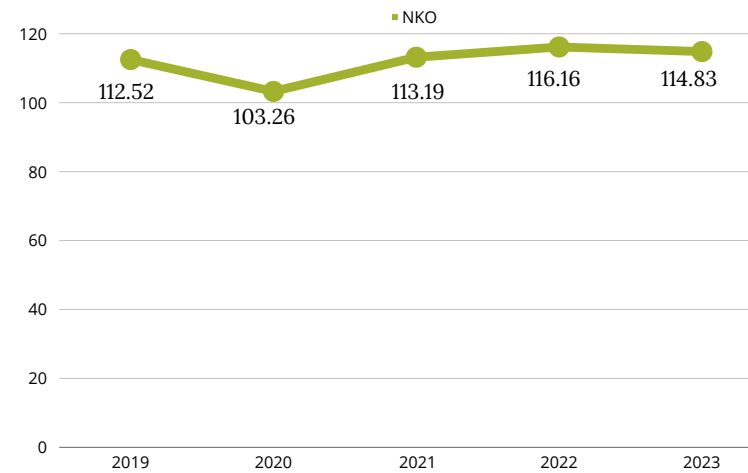




### 3. Historis Capaian Kinerja KPKNL Bontang Dalam 5 Tahun

Dalam lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh oleh KPKNL Bontang menunjukkan hasil yang cukup stabil. Selama tahun 2019-2023, perolehan NKO rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 111,99%. Hal ini menunjukkan, perolehan NKO KPKNL Bontang selalu mendapat predikat “Istimewa” berdasar pada penetapan sebaran predikat kinerja.

NKO dalam Lima Tahun Terakhir



NKO terkecil yang diperoleh KPKNL Bontang terjadi di Tahun 2020 sebesar 103.26%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang melemahkan semua sektor global. Sedangkan NKO tertinggi dalam lima tahun terakhir, diperoleh pada Tahun 2022 sebesar 116,16%. Capaian NKO ini berhasil membawa KPKNL Bontang sebagai peraih NKO tertinggi di Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Penjelasan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tahun	Sasaran Strategis	IKU Kemenkeu Three	NKO	Keterangan (IKU Implementasi yang tidak memenuhi target)
2019	12	16	112.52%	IKU Persentase Hasil Lelang dengan realisasi sebesar 85,33% dari target sebesar 100%
2020	12	20	103.26%	Terdapat 2 IKU Implementasi <u>bewarna merah</u> : - IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan realisasi sebesar 76,71% dari target sebesar 100% -IKU Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang) dengan realisasi sebesar 56,91% dari target sebesar 100%
2021	10	22	113.19%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 91,44% dari target sebesar 95,5%
2022	11	20	116.16%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 92,20% dari target sebesar 95,5%
2023	10	20	114.80%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 97,99% dari target sebesar 100%

Meskipun NKO di Tahun 2023, sedikit menurun sebesar 1,33% dari tahun sebelumnya, KPKNL Bontang tetap memperoleh predikat Istimewa dengan NKO sebesar 114,83%.

#### 4. Analisis, Evaluasi dan Rencana Aksi Kinerja

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) IKU Kemenkeu Three Tahun 2023 diperoleh hasil analisis atas pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kemenkeu Three sebagai berikut :

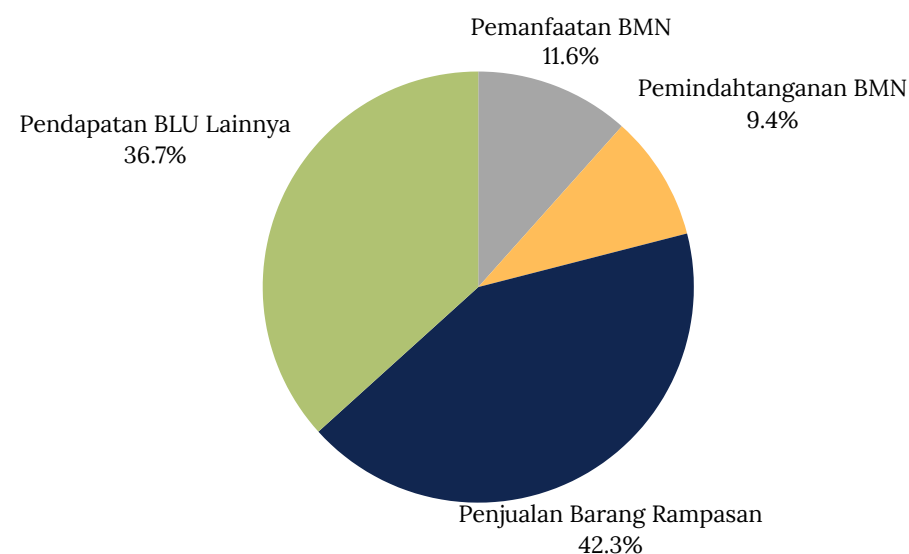
##### 1 Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Target penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada Tahun 2023 sebesar Rp6.802.000.000 dengan realisasi sebesar Rp8.216.005.242 (120,79%). Adapun rinciannya sebagai berikut :

- PNBP Pengelolaan BMN dengan target sebesar Rp4.300.000.000 berhasil tercapai sebesar Rp5.682.822.978 (132,16%)

Terdapat kenaikan PNBP dari Pengelolaan BMN yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, sebesar Rp1.418.394.346. Capaian tersebut didominasi oleh PNBP dari Penjualan Barang Rampasan sebesar 42,3% dan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 36,7%.

**Pendapatan PNPB Pengelolaan BMN**



Untuk Tahun 2024, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara akan fokus melakukan kunjungan dalam rangka identifikasi dan penggalan potensi penerimaan PNBP aset pada satuan kerja. Disamping itu, juga mendorong satuan kerja untuk melakukan pemindahtanganan aset bagi aset dengan kondisi rusak.

- PNBP Piutang Negara dengan target sebesar Rp2.000.000 dan capaian sebesar Rp1.721.156 (86,06%)

PNBP Piutang Negara masih kurang Rp278.884 dari target. Tidak tercapainya target, dikarenakan beberapa sebab diantaranya;

1. banyak BKPN dengan penanggung hutang yang memiliki kemampuan dan kemauan yang rendah dalam menyelesaikan hutangnya
2. Crash Program Keringanan Utang membuat pembayaran Biad Pengurusan Piutang Negara menjadi lebih kecil
3. Biad 1% untuk penyelesaian BKPN dengan SP3N kurang dari 6 bulan

Atas permasalahan di atas, selanjutnya Seksi Piutang Negara KPKNL Bontang akan melakukan penggalan potensi penyerahan baru BKPN dari Pemda Bontang dan RSUD Kutim, rekonsiliasi BKPN yang diurus pengurusannya oleh KPKNL Bontang dengan Penyerah Piutang pada tiap semester serta penagihan dan penelitian lapangan yang difokuskan pada debitur di wilayah Berau.

- PNBP Lelang dengan target sebesar Rp2.500.000.000 dengan capaian sebesar Rp2.531.461.108 (101,26%)

Capaian PNBP Lelang dilihat dari capaian PNBP Pejabat Lelang Kelas I dan capaian lelang pegadaian. Adapun di tahun 2023, capaian PNBP lelang Pejabat Lelang Kelas I berhasil tercapai sebesar Rp461.681.974 dari target sebesar Rp390.000.000. Surplus ini membantu capaian keseluruhan target PNBP Lelang. Mengingat, capaian PNBP lelang pegadaian tidak memenuhi target.

KPKNL BONTANG	1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan							
	1a-CP Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	40,84%	63,85%	63,85%	86,40%	86,40%	120,79%	120,79%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 2 Persentase Produktivitas Lelang

Sepanjang tahun 2023, terdapat 4 (empat) jenis lelang yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I. Lelang tersebut meliputi, lelang non eksekusi sukarela, lelang non eksekusi wajib, lelang eksekusi hak tanggungan dan lelang eksekusi selain hak tanggungan. Jumlah realisasi frekuensi lelang yang telah dilaksanakan sebanyak 224 dari 195.

Secara keseluruhan, Persentase produktivitas lelang ter-realisis sebesar 110,92%.



Rencana aksi kedepannya, untuk semakin meningkatkan lot lelang laku adalah dengan terus melakukan koordinasi dengan penjual serta pemasaran melalui media sosial KPKNL Bontang

Lot Lelang Tahun 2023

No	Jenis Lelang	Lot Laku	Jumlah Lot
1	Non Eksekusi Sukarela	38	111
2	Non Eksekusi Wajib	57	71
3	Eksekusi Hak Tanggungan	19	210
4	Eksekusi selain HT	17	52

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan								
1b-CP Persentase produktivitas lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	30%	45%	45%	80%	80%	80%	80%	Max / TLK
Realisasi	57,13%	65,38%	65,38%	96,77%	96,77%	110,92%	110,92%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 3 Indeks Integritas

Realisasi dari IKU ini merupakan realisasi secara nasional, yaitu sebesar 89,17 dari target 88,67. Sehingga, perolehan IKU tidak mencerminkan nilai indeks per unit. Namun demikian, KPKNL Bontang berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2024 dari capaian tahun ini.

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan								
1c-CP Indeks Integritas Organisasi								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	88,67	88,67	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	89,17	89,17	
Capaian	-	-	-	-	-	100,56%	100,56%	

## 4 Persentase Realisasi Pokok Lelang

Realisasi pokok lelang untuk lelang yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pelelang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp12.691.471.325 dari target sebesar Rp12.345.000. Sedangkan untuk realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp100.498.719.200 dari target sebesar Rp96.155.000.000. Sehingga total realisasi pokok lelang adalah sebesar Rp113.190.190.525 atau sebesar 104,32% dari target total sebesar Rp108.500.000.000

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang								
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	8,74%	33,81%	33,81%	61,40%	61,40%	104,32%	104,32%	
Capaian	43,69%	84,53%	84,53%	87,71%	87,71%	104,32%	104,32%	

Tercapainya target pokok lelang dan bea lelang pada KPKNL Bontang tahun 2023 masih didominasi oleh kontribusi lelang pegadaian sebesar 88%. Beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Bontang terkait lelang antara lain kondisi barang yang dilelang tidak marketable, jumlah lelang TAP mengingat objek lelang masih didominasi dengan objek tanah/bangunan yang masuk ke dalam jenis lelang eksekusi dengan nilai yang cukup tinggi serta lelang batal yang disebabkan karena pengumuman yang dipublikasikan memuat informasi yang salah.

## 5 Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

Realisasi penurunan nilai *outstanding* piutang negara pada tahun 2023 adalah sebesar 1697,45% atau Rp1.018.471.738,86 dari target sebesar Rp60.000.000. Penurunan Outstanding Piutang Negara tersebut berasal dari piutang pemerintah pusat sebesar Rp43.500.000 dan piutang pemerintah daerah sebesar Rp974.971.738,86.

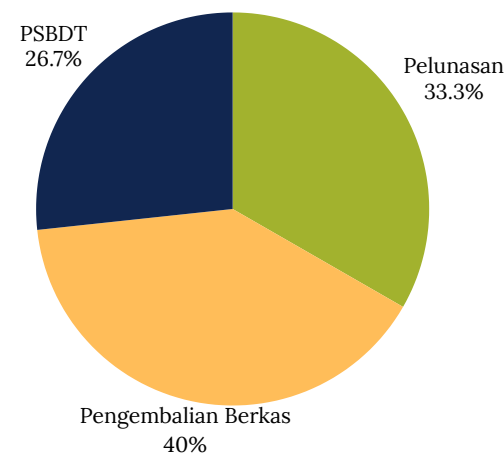
Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU Penurunan Outstanding Piutang Negara berupa Pengembalian BKPN, Penerbitan PSBDT, Pelunasan CPKU, Pelunasan dan Angsuran. Adapun kontributor terbesar penurunan outstanding piutang negara tahun 2023 berasal dari pengembalian 6 BKPN dengan total outstanding sebesar Rp933.608.666,86 (91,67% dari total realiasi penurunan outstanding piutang negara).

KPKNL BONTANG	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	40,74%	44,02%	44,02%	62,94%	62,94%	1697,45%	1697,45%	
Capaian	120%	120%	120%	104,90%	104,90%	120%	120%	

## 7 Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- BKPN lunas
- BKPN penarikan
- BKPN dikembalikan, dan
- BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)



Jumlah BKPN yang terselesaikan di 2023 sebanyak 15 berkas dari target 10 berkas Sehingga, realisasi tercapai hingga 150%.

## 6 Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN diukur dari 2 (dua) program yaitu :

- Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK

Program tercapai dengan realisasi sebesar 85,12% atau indeks maksimal sebesar 125,18% dari target 68%. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara salah satunya ialah Pemeliharaan BMN berupa Rumah Negara yang kurang diperhatikan oleh satuan kerja, sehingga rusak, idle dan tidak berpenghuni.

Disamping itu, pagu perjadi SBSK untuk Kabupaten Berau yang masih berada di KPKNL Tarakan juga menjadi concern tim.

## Penyelesaian BKPN

- Persentase bidang tanah yang disertipikatkan

Dari 96 bidang tanah yang menjadi target sertipikasi, tim dapat merealisasikan sebanyak 115 bidang tanah disertipikasi. Adapun kendala yang ditemukan terkait aplikasi SIPETIK milik Badan Pertahanan. Aplikasi belum siap untuk digunakan dalam hal alih media dari sertipikat fisik ke sertipikat elektronik. Namun demikian, tim Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bontang akan melakukan koordinasi yang intens dengan satker dan BPN.

KPKNL BONTANG	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3a-CP Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	12%	40,67%	40,67%	57,50%	57,50%	84%	84%	Max / TLK
Realisasi	45,33%	65,58%	65,58%	61,60%	61,60%	102,32%	102,32%	
Capaian	120%	120%	120%	107,13%	107,13%	120%	120%	

KPKNL BONTANG	3. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	3b-CP Persentase efektivitas penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	56%	66,67%	66,67%	80%	80%	150%	150%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 8 Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Tujuan yang ingin dicapai dari Implementasi IKU Deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien. IKU berhasil direalisasikan sebesar 0% dari target 25%. IKU ini merupakan IKU dengan polarisasi data minimize. Semakin rendah capaian, semakin baik.

KPKNL BONTANG	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	Min / TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 9 Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

Selama Tahun 2023, terdapat 502 laporan penilaian yang dihasilkan oleh Jafung Penilai KPKNL Bontang yang terdiri dari 483 laporan penilaian BMN, 14 laporan penilaian BMD dan 5 laporan untuk barang rampasan.

Dari 502 laporan, tujuan penilaian didominasi untuk pencatatan neraca (455), pemindahtanganan (30) dan pemanfaatan (17). Total nilai yang dihasilkan dari laporan penilaian dalam setahun sebesar Rp431.680.567.000. Adapun IKU berhasil direalisasikan dengan nilai sebesar 85,11 dari target 70.

Kedepannya, penilai KPKNL Bontang akan melakukan kegiatan penilaian BMN Aset Kelolaan LMAN untuk pencatatan neraca dan penilaian BMN PKP2B PT KPC untuk pemindahtanganan (berpotensi untuk dijual secara lelang).

KPKNL BONTANG	4. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	4b-CP Rata-Rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max / TLK
Realisasi	79,17	84,79	84,79	83,19	83,19	85,11	85,11	
Capaian	113,10%	120%	120%	118,85%	118,85%	120%	120%	

## 10 Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction dan E-Conventional Auction

Untuk mewujudkan pelayanan lelang yang lebih modern, saat ini KPKNL Bontang telah menggunakan aplikasi *e-Auction* untuk pelaksanaan lelang. Namun tidak hanya terbatas pada pelaksanaan lelang, KPKNL Bontang juga telah menggunakan modul permohonan *online* yang terdapat pada aplikasi *e-Auction* untuk menerima permohonan lelang. Tercatat selama Tahun 2023, jumlah realisasi frekuensi *e-Auction* sebanyak 223 kali dan *e-conventional Auction* sebanyak 1 kali.

KPKNL BONTANG	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang E-auction Dan E-conventional Auction							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	Max / TLK
Realisasi	100%	99,13%	99,13%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	106,38%	105,46%	105,46%	106,38%	106,38%	106,38%	106,38%	

## 11 Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online

Selama 2023, jumlah permohonan lelang online sebanyak 246 dan jumlah permohonan lelang sebanyak 250. Pengelolaan lelang yang semakin modern ini diharapkan dapat berpengaruh pada kenaikan tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

KPKNL BONTANG	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%	Max / TLK
Realisasi	98%	98,26%	98,26%	98,02%	98,02%	98,40%	98,40%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	114,42%	114,42%	

## 12 Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) meliputi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bobot 32 NUP aset dengan capaian 39 NUP aset (121,88%), Persentase Penyampaian Rekomendasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) bobot 32 NUP aset dengan capaian 39 NUP aset (121,88%) serta tindak lanjut satuan kerja dengan capaian 17 NUP dari target 13 NUP. Secara keseluruhan IKU ini tercapai sebesar 123,65%.

Rencana kerja kedepan dari Tim Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara adalah untuk menyusun laporan portofolio aset dan mengarahkan satker dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi.

KPKNL BONTANG	5. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							Pol/ KP
	5c-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	
Target				75%	75%	100%	100%	Min / TLK
Realisasi				175,17%	175,17%	123,65%	123,65%	
Capaian				120%	120%	120%	120%	

## 13 Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara

Jumlah persetujuan atau penetapan pengelolaan BMN selama periode 2022-2023 sebanyak 26 (dua puluh enam). IKU Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara berhasil direalisasikan sebesar 100% dengan indeks maksimal sebesar 116,28% dari target 86% .

Kendali proses Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN berada di satker yang bersangkutan, sehingga perlu adanya wasdal dan komunikasi yang berkesinambungan dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Bontang dalam mendorong satker berupaya sebaik mungkin.

KPKNL BONTANG	6. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							Pol/ KP
	6a-CP Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	
Target	-	50%	50%	-	50%	86%	86%	Max / TLK
Realisasi	-	92,31%	92,31%	-	100%	100%	100%	
Capaian	-	120%	120%	-	120%	116,28%	116,28%	

## 14 Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (PPID)

IKU Rata-Rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (PPID) tidak ada capaian karena tidak adanya permintaan permohonan informasi publik selama Tahun 2023. Kendati demikian, Seksi Hukum dan Informasi telah mengupayakan pemberian layanan informasi yang memudahkan para pengguna, seperti :

- Penyediaan form permintaan informasi publik pada Area Pelayanan Terpadu (APT), APT Online maupun pada website.
- Pencatuman daftar informasi publik yang wajib diumumkan pada website kantor
- Penyematan link proses alur PPID serta form pengajuan layanan informasi publik
- APT Online

KPKNL BONTANG	7. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif							Pol/ KP
	7a-N Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	-	-	

## 15 Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal yang berwarna kuning. Realisasi IKU tersebut sebesar 97,99% dari target sebesar 100%. Beberapa sebab IKU tersebut tidak tercapai, diantaranya adalah :

- Formula dari IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan kombinasi perhitungan dari IKPA dan SMART DJA. Dimana, formula tersebut sempat mengalami perubahan di akhir tahun
- Target efisiensi minimal 10% untuk mendapatkan nilai optimal dari SMART DJA dirasa cukup berat. Dikarenakan akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada stakeholder.

KPKNL BONTANG	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	95,5%	95,5%	95,5%	100%	100%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	100%	100%	100%	114,60%	114,60%	97,99%	97,99%	
Capaian	104,71%	104,71%	104,71%	114,60%	114,60%	97,99%	97,99%	

Kedepannya, Subbagian Umum dalam mengoptimalkan pencapaian IKU tersebut akan memfokuskan pada kegiatan yang meliputi :

1. Optimalisasi capaian IKPA setiap triwulan (nilai 100)
2. Realisasi Belanja modal kendaraan dinas sebanyak 4 (empat) unit pada Februari 2024
3. Realisasi Pembelian 6 unit Rumah Negara pada Semester I Tahun 2024
4. Realisasi Belanja modal peralatan dan mesin lainnya pada Maret 2024

## 16 Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

IKU berhasil tercapai sebesar 238% dari target sebesar 100% dan mendapat indeks akhir maksimal sebesar 120%. Dalam pencapaian IKU, Subbagian Umum telah memaksimalkan pemanfaatan sistem pengadaan seperti SiRUP, e-purchasing serta pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing.

Untuk menjaga kualitas IKU, Subbagian Umum akan melakukan koordinasi serta monev Realisasi Belanja Modal dengan staf Pengadaan Barang Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran per tiap triwulannya.

KPKNL BONTANG	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	238%	238%	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

## 17 Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN

IKU Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN dari SS Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal ter-realisis sebesar 0% dari target 15%. Dalam memaksimalkan pencapaian target, pengisian dan monitoring data dropbox serta focusPN dilakukan setiap akhir bulan antara pelemang, admin *dropbox* serta bendahara penerimaan.

Kegiatan ini akan terus dilanjutkan pada Tahun 2024 untuk memastikan tidak terjadi selisih antara data pada Focus PN, *Dropbox* Lelang dan Focus PN.

KPKNL BONTANG	8. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
	8d-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ KP
Target	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	Min / TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

## 18 Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif tercapai pada angka 98,41 dari target 60. Perolehan angka indeks akhir maksimal sebesar 120%. Paramater dari perhitungan formulasi IKU sangat beragam dan lebar.

KPKNL BONTANG	9. Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
	9b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	60	60	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	98,41	98,41	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

## 19 Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko

IKU dengan perolehan nilai sebesar 96,50 dari target 80. Realisasi IKU tidak dapat maksimal dikarenakan Kertas Kerja Pengelolaan Kinerja Pegawai tidak disampaikan dari awal tahun. Kendati demikian, Seksi Kepatuhan Internal dan Subbagian Umum telah melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan kinerja pegawai sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

KPKNL BONTANG	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	80	80	Max / TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,33	95,33	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

## 20 Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU tercapai sebesar 120% dari target sebesar 100%. Kedepannya, Subbagian Umum tetap akan berupaya dalam mengembangkan kompetensi pegawai, meliputi kegiatan :

- Penyusunan Individual Development Plan (IDP)
- Mengusulkan pegawai yang belum memiliki kompetensi di Seksi/Subbag untuk dipanggil Diklat
- Mengkomunikasikan secara aktif pemanggilan diklat kepada pegawai
- Monitoring triwulanan capaian pengembangan kompetensi seluruh pegawai

KPKNL BONTANG	10. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	10b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max / TLK
Realisasi	72%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

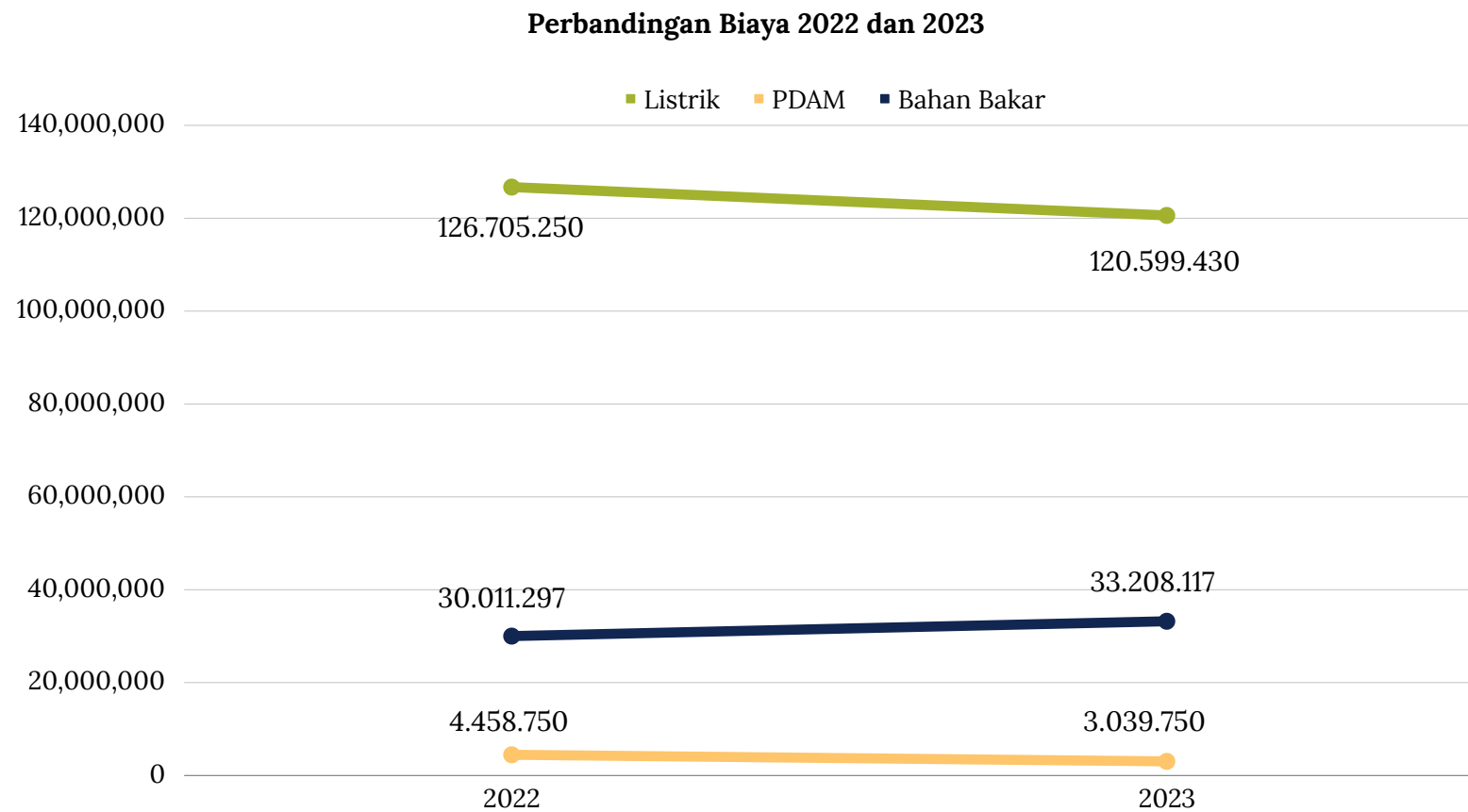
## 5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi penggunaan Sumber Daya pada KPKNL Bontang tergambar dari penggunaan listrik, air dan bahan bakar. Pada Tahun Anggaran 2023 KPKNL Bontang mengalami penurunan penggunaan listrik, air dan bahan bakar jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

Hal ini dapat terlihat dari penurunan penggunaan volume serta beban biaya dari listrik, air dan PDAM.

Pada Tahun 2023 terjadi penurunan pemakaian listrik sebesar 8.823,5 Kwh atau sebesar Rp6.105.820,00, hal ini disebabkan karena Tahun 2023 KPKNL Bontang ditunjuk sebagai kantor yang mengimplementasikan konsep kantor berbasis Activity Based Workplace (ABW). Konsep ABW salah satunya berupa penerapan ruang kerja open space sehingga turut berpengaruh pada pengurangan penggunaan lampu dan AC. Tahun 2023 juga terjadi penurunan penggunaan air (PDAM) yaitu sebesar 287,34 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp1.419.000,00, hal ini disebabkan salah satu program habituasi hemat energi yang diterapkan di KPKNL Bontang pada Tahun 2023.

Sedangkan untuk penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 28,21 liter namun secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp3.196.820,00. Penurunan konsumsi BBM disebabkan karena adanya penghapusan 2 (dua) unit kendaraan dinas Roda 2 dan kendaraan dinas jabatan pada Bulan Desember 2023. Sedangkan kenaikan nominal rupiah penggunaan BBM disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM pada tanggal 1 November 2023.



Selama Tahun 2023, KPKNL Bontang telah menghemat sebesar Rp432.800,- atau 2.68% dari tahun sebelumnya

# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## B. Realisasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 KPKNL Bontang sebesar Rp1.620.148.000 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan akumulasi penyerapan mencapai 99,65%. Terdapat 2 (dua) Sumber Dana DIPA KPKNL Bontang TA 2023 yaitu Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan rincian:

No	Sumber Dana	Pagu TA 2023	Penyerapan
1	Rupiah Murni (RM)	Rp1,544,964,000	99,64%
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp100,000,000	99,80%

Pada tanggal 11 April 2023 melalui Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-1290/KN.1/2023 perihal Revisi Target dan Anggaran Top Down Satgas BLBI, Sertifikasi BMN, dan Portofolio Aset Lingkup UE 1 DJKN TA 2023, KPKNL Bontang mendapat tambahan target Sertifikasi BMN dan Portofolio Aset, serta penambahan anggaran untuk RO Sertifikasi BMN sejumlah Rp24.816.000, sehingga **DIPA KPKNL Bontang TA 2023 menjadi Rp1.644.964.000.**

Penggunaan DIPA tersebut dialokasikan untuk 19 Rincian Output. Terdapat 5 Rincian Output (RO) dengan tingkat penyerapan 100% yaitu Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara, Risalah Lelang, Rekomendasi Hasil Penilaian, Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU), dan Rekomendasi Kepatuhan Internal. Pencapaian RO yang melebihi target awal dari pagu berjumlah 18 RO. Rata-rata capaian RO Tahun 2023 yang dicapai sebesar 227,56% dari target menggunakan DIPA yang ada.



No	Rincian Output (RO)	Pagu TA 2023 (dalam Rupiah)	Realisasi/ Penyerapan Anggaran	Capaian RO (% dari target)
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	7.268.000	100%	205%
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	4.260.000	75,68%	112,7%
3	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	18.578.000	99,08%	84,4%
4	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	8.700.000	92,45%	187,5%
5	Risalah Lelang	13.776.000	100,00%	192,7%
6	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	40.000.000	99,50%	100%
7	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	21.156.000	99,89%	130%
8	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	22.380.000	94,44%	414,75%
9	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1.314.000	96,19%	300%
10	Rekomendasi Hasil Penilaian	9.792.000	100,00%	200%
11	Penggalian Potensi Lelang	60.000.000	100,00%	100%
12	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	25.296.000	100,00%	119%
13	Layanan Bantuan Hukum	5.824.000	98,78%	700%
14	Kerumahtanggaan	76.344.000	99,64%	100%
15	Layanan Perkantoran	1.021.490.000	99,94%	100%
16	Peralatan Fasilitas Perkantoran	288.842.000	99,75%	100%
17	Pembinaan/Edukasi Publik	4.160.000	84,30%	953,3%
18	Kehumasan	6.952.000	98,71%	123,3%
19	Rekomendasi Kepatuhan Internal	8.832.000	100,00%	100%
<b>TOTAL PAGU</b>		<b>1.644.964.000</b>		

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Bontang ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Bontang sebagai instansi vertikal DJKN di daerah serta upaya peningkatan good governance yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020 telah sesuai dengan yang target bahkan beberapa di antaranya memperoleh capaian di atas 100 persen.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Bontang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan secara eksternal, Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga pada akhirnya KPKNL Bontang dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan secara profesional dan akuntabel.

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan KPKNL Bontang dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

### 1) Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, dengan cara:

- Implementasi dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan BMN yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJKN
- Implementasi basis akrual dan Peningkatan kualitas penyajian Nilai BMN.
- Pengawasan dan pengendalian BMN secara efektif.
- Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian BMN.
- Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang Kekayaan Negara pada satker- satker di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau serta penguatan edukasi di bidang pengelolaan kekayaan negara kepada stakeholder.
- Optimalisasi BMN melalui revaluasi kinerja BMN, penggunaan bersama oleh beberapa unit, serta sinergi pemanfaatan dengan BUMN dan/atau swasta.
- Mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan menggunakan indikator Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- Percepatan sertifikasi BMN.

### 2) Pelayanan Lelang yang Modern dan Terpercaya, dengan cara:

- Penggalan potensi lelang untuk seluruh jenis lelang di wilayah kerja Kota Bontang Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau antara lain kepada instansi-instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun pihak swasta untuk lelang eksekusi maupun non eksekusi.
- Improvisasi dan inovasi sosialisasi lelang guna peningkatan pelayanan (modernisasi lelang melalui e-auction).
- Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang

### 3) Peningkatan Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Efisien, dengan cara:

- Melakukan kegiatan knowledge sharing, diskusi berkala, in house training di bidang penilaian.
- Mengoptimalkan kegiatan komite penilaian dan kaji ulang laporan penilaian demi menjaga kualitas laporan yang dihasilkan oleh tim penilai.
- Melakukan survey data harga dan sewa properti dengan cara mengumpulkan data transaksi atau penawaran yang ada di seluruh wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.
- Melaksanakan penilaian dengan menggunakan metode yang tepat dan akurat serta berusaha menjaga independensi sebagai penilai yang profesional.

### 4) Terwujudnya Pengurusan Piutang Negara yang optimal dan terwujudnya PNBPN dari pengurusan piutang negara yang optimal, dengan cara:

- Mengoptimalkan upaya penagihan
- Melakukan *debtor tracing* dan *asset tracing*, dengan jalan berkoordinasi dengan instansi/stakeholder terkait untuk mencari/memeriksa debitur yang belum diketahui keberadaannya atau mencari aset/harta kekayaan lain yang dimiliki debitur;
- Melakukan inventarisasi berkas piutang negara penyerahan dari Kementerian/Lembaga serta mengoptimalkan tingkat pengurusan piutang negara;
- Melakukan inventarisasi pengurusan piutang negara penyerahan.

### 5) Birokrasi dan layanan publik KPKNL Bontang yang agile, efektif, dan efisien, dengan cara:

- Organisasi dan SDM yang optimal.
- Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah.
- Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
- Komunikasi publik yang efektif.

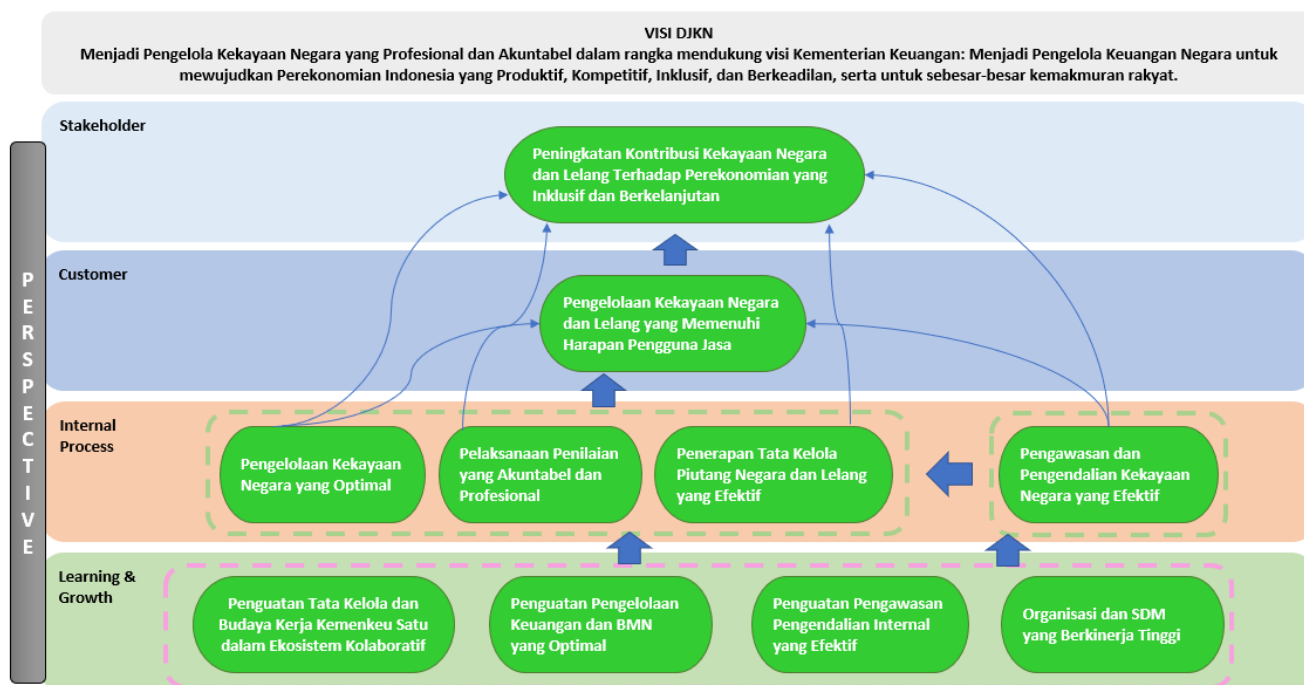
# L a m p i r a n

# ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

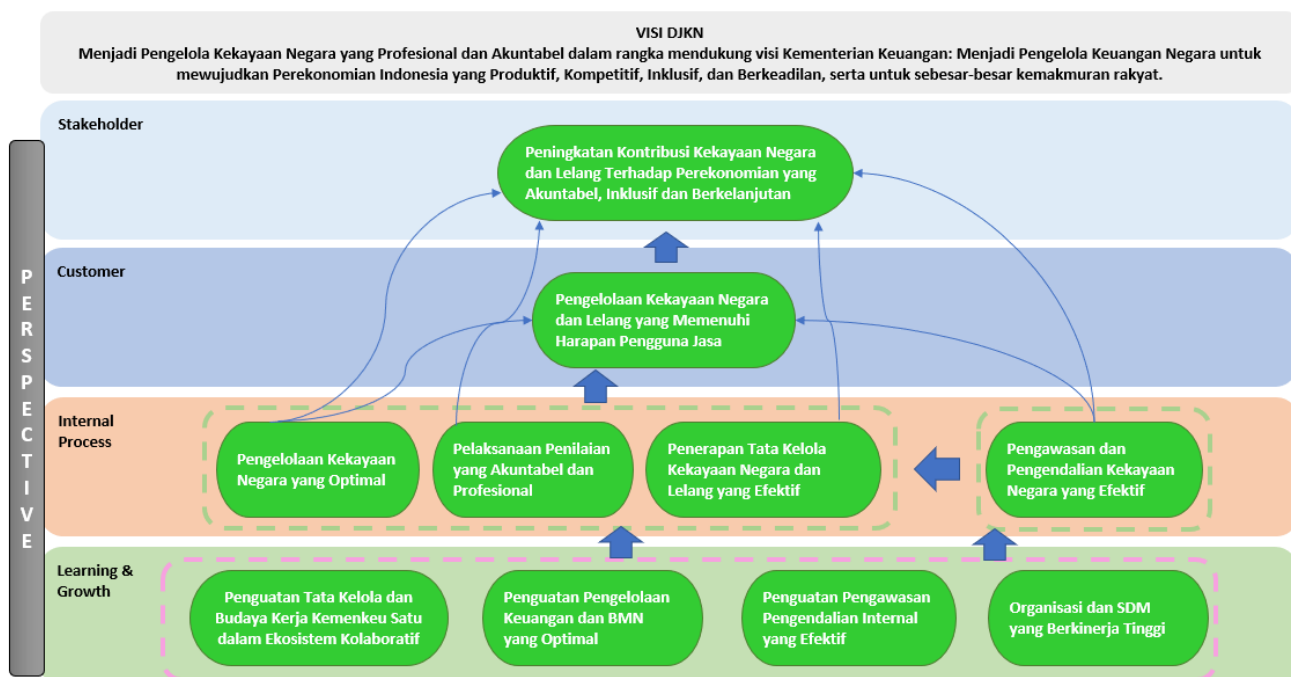
NOMOR: PK-04A/WKN.13/2023

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja nomor PK-04/WKN.13/2023 tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

## Peta Strategis sebelum adendum:



## Peta Strategis setelah adendum:



### a. Perubahan Nama Sasaran Strategis

Sebelum		Menjadi	
Kode SS	Sasaran Strategis	Kode SS	Sasaran Strategis
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan	1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif, dan Berkelanjutan
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

#### b. Reposisi Indikator Kinerja Utama antar Sasaran Strategis

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Internal process perspective						Learning and growth perspective					
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif					8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal				
5c-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	8d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%

#### c. Perubahan Nama IKU

Sebelum		Menjadi	
Kode IKU	Nama IKU	Kode IKU	Nama IKU
3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara

#### d. Penambahan IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y
-	-	-	-	-	-	1c-CP	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
-	-	-	-	-	-	5c-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%

#### e. Penghapusan IKU

Sebelum		Menjadi	Penjelasan
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama		
8c-N	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang.
9a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	IKU dihapus dari PK Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang.

#### f. Perubahan Trajectory Target IKU

Sebelum						Menjadi					
Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Target				Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q3	s.d. Q3	Q4	Y			Q3	s.d. Q3	Q4	Y

									Q3		
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Optimal	63,33%	63,33%	89,33%	89,33%	3a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara	57,5%	57,5%	84%	84%
8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	8a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100
8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	8b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%

Adendum PK ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito

Samarinda, 27 September 2023

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Harist Syafiuddin



## ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 31 Januari 2023, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Pengelolaan BMN yang Optimal	89,33%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	enguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	enguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	10%	enguatan Internal atau Anggaran
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian	Indeks Integritas Organisasi	94,33	enguatan Internal atau Anggaran



Sebelum				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
	Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran

Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan
		Indeks Integritas	88,67	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	84%	Proses Bisnis
		Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	100%	Proses Bisnis
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pelaksanaan E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	Proses Bisnis
		Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
8	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	15%	Penguatan Internal atau Anggaran



Menjadi				
No	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
9	Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran

## B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

### Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	60%	60%	100%	100%
2	Persentase Produktivitas Lelang	60%	60%	80%	80%	2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%	3	Indeks Integritas	-	-	88,67	88,67
4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%	4	Persentase Realisasi Pokok Lelang	70%	70%	100%	100%
5	Pengelolaan BMN yang Optimal	63,33 %	63,33%	89,33%	89,33%	5	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	60%	60%	100%	100%



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	60%	60%	100%	100%	6	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN	57,5%	57,5%	84%	84%
7	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%	7	Persentase Penyelesaian (Berkas Kasus Piutang Negara) BKPN	60%	60%	100%	100%
8	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	8	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	25%	25%	25%	25%
9	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%	9	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70
10	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	86%	86%	10	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	94%	94%	94%	94%
11	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	11	Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	63%	63%	86%	86%
12	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%	12	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	75%	75%	100%	100%
13	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100	13	Tingkat Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	86%	86%
14	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	14	Rata-rata Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik	100	100	100	100
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	85%	85%	100%	100%	15	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100



Sebelum						Menjadi					
No	IKI	Target				No	IKI	Target			
		Q3	s.d.Q3	Q4	Y			Q3	s.d.Q3	Q4	Y
16	Persentase Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	-	-	10%	10%	16	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	-	-	100%	100%
17	Indeks Integritas Organisasi	-	-	94,33	94,33	17	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%
18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	60	60	18	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	-	-	60	60
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80	19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%	20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	75%	75%	100%	100%



Adendum SKP ini mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2023.

Samarinda, 27 September 2023

Menyetujui,

Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Bontang,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito



Ditandatangani Secara Elektronik

Harist Syafiuddin



